

Kegiatan MBKM untuk Mendukung Pengembangan Perguruan Tinggi dan Pembangunan: Studi Kasus Pelaksanaan Magang Bersertifikat di Kementerian ATR/BPN

Jumadi*, Yuli Priyana, Danardono, M Iqbal Taufiqurrahman Sunariya, Aditya Saputra, Yuli Priyana, Choirul Amin, Hamim Zaky Hadibasyir, Vidya N. Fikriyah

Fakultas Geografi UMS, Kampus 1 UMS Gedung I Lt. 2, Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Surakarta 57162, Jawa Tengah, Indonesia

* email: jumadi@ums.ac.id

Abstract. *MBKM program gives opportunities for students in enhancing their competency through various activities intra or extra campus. Those activities have potential impact for both university and region. This paper explores the potential of MBKM program in enhancing university and regional development. We conducted a survey for students to reveal the data of student's opinion and synthesise with literature review to examine the benefit of this program for both university and regional development. A case study of MBKM program with ministry of Landuse Planning (ATR/BPN) is also discussed and evaluated on this context.*

Keywords: *MBKM; regional potency; regional development; university.*

Abstrak. *Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang yang fleksibel bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan kemahasiswaan ini memiliki potensi dalam pengembangan internal bagi perguruan tinggi maupun eksternal untuk pengembangan kewilayahan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplor potensi kegiatan MBKM untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi dan pengembangan wilayah. Penelitian menggunakan data hasil survei mahasiswa dilengkapi dengan literatur review untuk menguji keuntungan dari pelaksanaan program MBKM bagi pengembangan perguruan tinggi dan wilayah. Kegiatan magang dengan Kementerian ATR/BPN didiskusikan dan dievaluasi sebagai studi kasus dalam konteks tersebut*

Kata Kunci: *MBKM; potensi wilayah; pengembangan wilayah, universitas.*

I. PENDAHULUAN

Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) memberikan ruang yang fleksibel bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan di dalam maupun di luar kampus. Program ini terdiri atas delapan kegiatan yang dapat diikuti mahasiswa sebagai pengganti kegiatan pembelajaran di kampus (Dirjen Dikti, 2020). Delapan kegiatan tersebut antara lain pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik.

Kegiatan kemahasiswaan ini memiliki potensi dalam pengembangan internal bagi perguruan tinggi maupun eksternal untuk pengembangan kewilayahan. Perguruan tinggi merupakan lembaga penghasil tenaga kerja terampil dan tenaga ahli berkarakter serta memiliki kemampuan inovasi yang berdaya saing melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi (Wibawa, 2017). Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban PT sesuai UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9 meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan sinergi yang tidak dapat dipisahkan guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif. Kegiatan pendidikan dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta

pengabdian kepada masyarakat berguna untuk mengimplementasikan hasil penelitian untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian diharapkan mampu meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan daya inovasi mahasiswa. Namun demikian, dampak keterlibatan mahasiswa mahasiswa tersebut dirasa belum nyata karena belum adanya alokasi waktu khusus dan pengakuan yang cukup bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Kegiatan MBKM yang merupakan salah satu bentuk implementasi konsep *link and match* antara perguruan tinggi dan industri yang digagas sejak tahun 1990an (Kodrat, 2021). Program ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan dunia industri, dunia usaha maupun kemasyarakatan sehingga memiliki pengalaman dan kompetensi tambahan yang tidak didapatkan di perguruan tinggi. Pengalaman dan kompetensi tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan keterserapan lulusan di dunia kerja sebagai salah satu IKU Perguruan Tinggi. Selain itu, pelaksanaan program MBKM khususnya magang, kegiatan wirausaha dan membangun desa/KKN tematik berpotensi untuk mendukung pengembangan wilayah.

Aspek pertanahan dan tata ruang berkaitan erat dengan pembangunan (Umar et al., 2019; Amir, 2018). Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan kementerian yang menaungi urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga diberi mandat oleh Presiden untuk mengurus perkara tata ruang di Indonesia (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015). Ilmu geografi memiliki keterkaitan erat dengan aspek pertanahan dan tata ruang (Djaja, 2016; Giyarsih, 2016). Keterkaitan yang erat antara ilmu geografi dengan pertanahan dan tata ruang membuka peluang kegiatan MBKM berupa magang oleh mahasiswa Fakultas Geografi di Kementerian ATR/BPN. Pelaksanaan magang mahasiswa geografi di Kementerian ATR/BPN yang erat dengan aspek pertanahan dan tata ruang dapat mendukung pengembangan perguruan tinggi asal mahasiswa dan pembangunan dalam konteks yang lebih luas. Penelitian terkait pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi sudah banyak dilaksanakan (misalnya: Hermanto et al., 2021; Krisnanik et al., 2021; Mansur et al., 2021), namun sedikit dari penelitian tersebut yang mengaitkan dampaknya terhadap pembangunan. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi kegiatan MBKM untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi dan pembangunan.

II. TINJAUAN PUSTAKA KEGIATAN MBKM

Kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan wilayah merupakan tema yang semakin menarik perhatian seiring dengan peran perguruan tinggi yang telah berubah secara signifikan selama 25 tahun terakhir. Secara umum diterima bahwa perguruan tinggi merupakan sumber utama pengetahuan baru dan sumber daya manusia (SDM) sehingga dengan demikian perguruan tinggi merupakan sumber potensial inovasi dan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun regional (Sanchez-Carrillo, Cadarso, & Tobarra, 2021).

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat signifikan terhadap pembangunan lokal dan regional melalui beberapa saluran peran. Namun demikian, para peneliti sepakat bahwa pembentukan modal manusia merupakan saluran utama di mana lembaga pendidikan tinggi dapat mempengaruhi dinamika ekonomi wilayah. (Abel & Deitz, 2012; Santoalha, Biscaia, & Teixeira, 2018).

Lembaga pendidikan tinggi semakin diharapkan tidak hanya untuk melakukan pendidikan dan penelitian saja, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di wilayahnya. Sejauh mana lembaga pendidikan tinggi dapat memainkan peran ini tergantung pada sejumlah faktor antara lain: karakteristik lembaga, wilayah di mana mereka berada, dan kerangka kebijakan yang disusun (Sanchez-Carrillo et al., 2021; Trippl, Sinozic, & Lawton Smith, 2015). Bagaimana meningkatkan kontribusi pendidikan tinggi untuk keberlanjutan pembangunan wilayah merupakan tema perdebatan yang aktual, tidak hanya dalam hal

kompetensi lulusannya tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

Tersedia literatur yang luas tentang peran perguruan tinggi dalam pembangunan Wilayah. Literatur-literatur tersebut terutama menyoroti tentang lembaga pendidikan tinggi yang diharapkan dapat memenuhi misi tradisional mereka (pengajaran dan penelitian) dan di samping itu, melakukan misi baru yang mencerminkan kontribusi ekonomi, sosial, dan budaya bagi pembangunan wilayah (Goddard & Vallance, 2013; Tripl et al., 2015). Literatur yang tersedia telah mencerminkan di mana universitas telah menjadi pemain kunci dalam pembangunan ekonomi, dan di mana pembuat kebijakan (Pemerintah) telah berusaha untuk menerapkan model yang sukses (Goddard & Vallance, 2013; Tripl et al., 2015).

Salah satu model yang sukses adalah Model “engaged university” yang merupakan sebuah konsep untuk memahami adaptasi fungsi universitas dengan kebutuhan wilayah (Tripl et al., 2015; Uyarra, 2010). Model “engaged university” memfokuskan kegiatannya terhadap industri dan masyarakat lokal dan secara aktif membentuk identitas wilayah (Brenzitz & Feldman, 2012; Gunasekara, 2006).

Model dapat diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Perguruan tinggi dapat menyesuaikan kegiatan pengajaran mereka dengan kebutuhan lokal melalui penyediaan program yang berfokus pada wilayah, perekrutan mahasiswa lokal dan mempertahankan lulusan. Keterlibatan perguruan tinggi juga ditunjukkan dalam kegiatan seperti integrasi formal kebutuhan wilayah dalam prioritas universitas, koordinasi jaringan regional dan saran kebijakan. Selain itu, “engaged university” dapat melibatkan diri secara langsung dengan perusahaan-perusahaan lokal, memberikan bantuan dan dukungan berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Gunasekara, 2006).

Keterlibatan universitas dalam pengembangan wilayah dipengaruhi oleh pergeseran agenda kebijakan dari fokus pada tantangan nasional dan penelitian dasar menuju orientasi pada konteks regional (Charles, Kitagawa, & Uyarra, 2014). Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa tingkat dan jenis keterlibatan regional perguruan tinggi dipengaruhi oleh usia universitas dan lokasinya. Universitas yang lebih muda dan yang berlokasi di luar wilayah metropolitan cenderung memiliki fokus yang lebih kuat pada keterlibatan regional (Boucher, Conway, & Van Der Meer, 2003).

Model “engaged university” ini dapat diwujudkan dalam program magang yang merupakan salah satu bentuk Merdeka Belajar kampus Merdeka (MBKM). Dalam konteks kebijakan, MBKM merupakan kebijakan baru dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Merdeka Belajar artinya siswa mempunyai hak yang signifikan untuk memilih model pembelajaran dalam mengembangkan dan memperoleh pengalaman belajarnya (Kodrat, 2021).

Sejak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi diterbitkan, pemerintah menjalankan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kebijakan tersebut memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar program studi di luar kampus selama tiga semester (Dirjen Dikti, 2020). Pemberian hak mahasiswa untuk belajar di luar kampus harus diakomodasi secara ketat oleh universitas. Program MBKM sejalan dengan model link and match yang ditetapkan oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro pada tahun 1993. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah merupakan landasan instruksional untuk menciptakan lulusan yang siap kerja (Soesilowati, 2009). Dari sinilah, Indonesia telah menginjakkan kaki ke dalam Industrialisasi pendidikan. Lulusan sekolah sangat erat kaitannya dengan dunia kerja—karya para lulusan. Kerja sama intensif antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri (DIDU) dilakukan. Keahlian lulusan kemudian diasah dengan pengakuan seperti sertifikat kompetensi atau reposisi manajemen sekolah dengan menerapkan sistem penjaminan mutu versi ISO 9001:2008 (Kodrat, 2021).

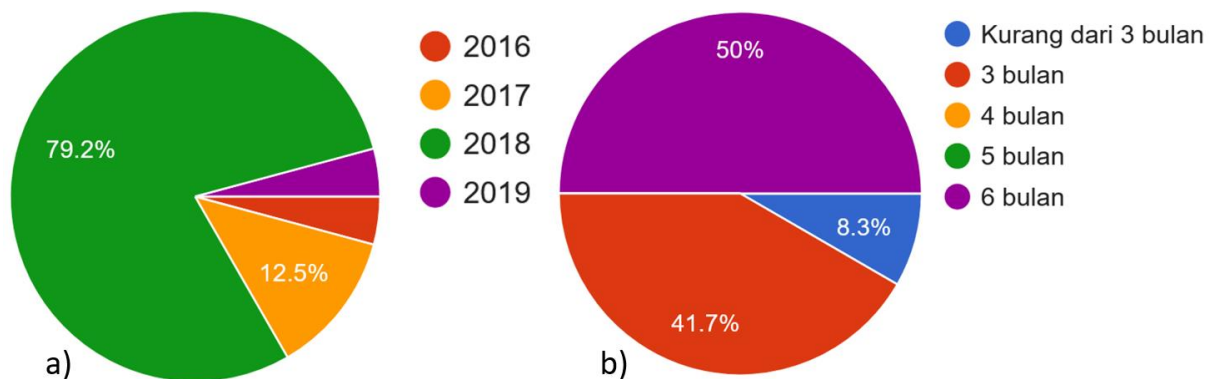
III. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data hasil survei mahasiswa dilengkapi dengan literatur review untuk menguji keuntungan dari pelaksanaan program MBKM bagi pengembangan perguruan tinggi dan wilayah. Survei dilakukan berbasis form daring dengan Google Form. Mahasiswa yang dilibatkan dalam survei adalah mahasiswa Fakultas Geografi UMS yang mengikuti magang di Kementerian ATR/BPN. Kegiatan magang dengan kementerian ATR/BPN didiskusikan dan dievaluasi sebagai studi kasus dalam konteks tersebut pengembangan perguruan tinggi dan pembangunan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

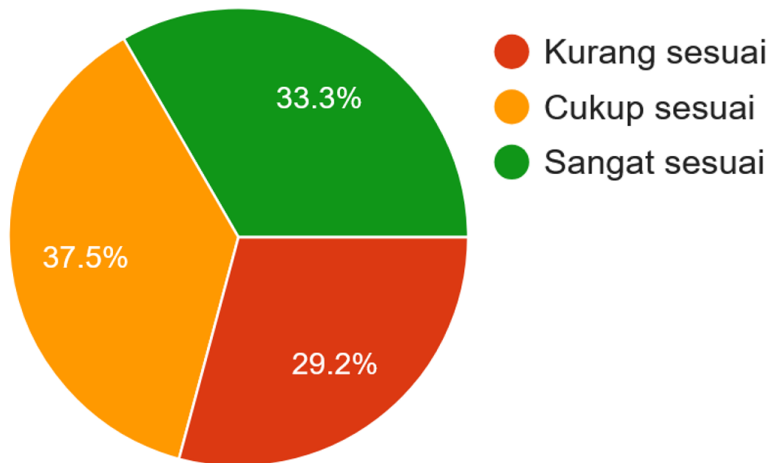
a) Analisis Hasil Survei Mahasiswa Geografi UMS yang Magang di ATR/BPN

Berdasarkan hasil survei terhadap 24 mahasiswa Fakultas Geografi UMS yang mengikuti magang di Kementerian ATR/BPN tahun 2021, sebagian besar diikuti oleh mahasiswa angkatan 2018 (79,2%), lalu jumlah tersebut disusul oleh angkatan 2017 (12,5%), 2016 (4,2%), dan 2019 (4,2%) (Gambar 2). Durasi magang yang dilakukan sebagian besar adalah 6 bulan (50%) dan 3 bulan (41,7%) (Gambar 2). Lokasi magang bervariasi, yang terdiri atas ATR/BPN di tingkat pusat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta, Salatiga, Kabupaten Ngawi, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, dan Magetan.



Gambar 2. Rekapitulasi (a) angkatan mahasiswa Geografi UMS dan (b) durasi magang di ATR/BPN

Hasil survei mengenai kesesuaian pekerjaan yang dilakukan mahasiswa geografi saat magang dengan ilmu geografi disajikan pada Gambar 3. Berdasarkan hasil survei tersebut, pekerjaan yang dilakukan mahasiswa Geografi UMS saat magang di Kementerian ATR/BPN sebagian besar telah sesuai dengan keilmuan geografi. Namun, sebagian kecil diantaranya mendapat mandat pekerjaan yang kurang sesuai dengan keilmuan geografi (29,2%). Mandat pekerjaan yang kurang sesuai tersebut diantaranya adalah pekerjaan mengenai hal-hal administrasi, digitalisasi surat ukur, validasi buku tanah, dan pengarsipan dokumen.



Gambar 3. Rekapitulasi kesesuaian pekerjaan magang mahasiswa Geografi UMS dengan keilmuan geografi

b) Dampak pelaksanaan MBKM terhadap pengembangan perguruan tinggi

Dampak pelaksanaan magang MBKM mahasiswa geografi di Kementerian ATR/BPN terhadap pengembangan perguruan tinggi (UMS), khususnya Fakultas Geografi UMS, dapat berupa masukan mengenai keilmuan geografi yang banyak dibutuhkan di dunia kerja, potensi kerjasama dengan mitra magang, peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa, dan modal untuk meraih akreditasi institusi yang unggul. Berdasarkan hasil survei, pekerjaan yang dilakukan mahasiswa Geografi UMS saat magang yang berkaitan dengan keilmuan geografi berupa pengukuran bidang tanah menggunakan alat ukur tanah, inventarisasi data spasial, visualisasi data menjadi peta, memberi rekomendasi kebijakan berbasis data spasial, dan analisis dokumen tata ruang. Adanya bukti konkrit mengenai penerapan ilmu geografi tersebut di dunia kerja dapat menjadi pertimbangan dalam revisi kurikulum Program Studi Geografi, Fakultas Geografi UMS.

Adanya pelaksanaan magang di Kementerian ATR/BPN semakin membuka peluang kerjasama lebih lanjut di kemudian hari karena dari pihak kementerian tersebut telah memantau secara langsung kompetensi keilmuan geografi dalam konteks pertanahan dan tata ruang. Bukti konkrit partisipasi mahasiswa geografi dalam menjalankan pekerjaan mengenai tata ruang dan pertanahan di Kementerian ATR/BPN (Gambar 4) telah meningkatkan rekognisi program studi Geografi UMS di dunia pertanahan dan tata ruang. Perguruan tinggi asal mahasiswa juga diuntungkan dengan adanya pelaksanaan magang oleh para mahasiswanya, karena magang dapat mengasah soft skill dan hard skill (Lutfia & Rahadi, 2020; Nugraheni & Wijaya, 2017). Peningkatan kompetensi melalui magang dapat menjadi aset yang bermanfaat dalam menunjang akreditasi suatu perguruan tinggi karena kualitas mahasiswa merupakan salah satu indikator dalam penilaian akreditasi (BAN PT, 2019).

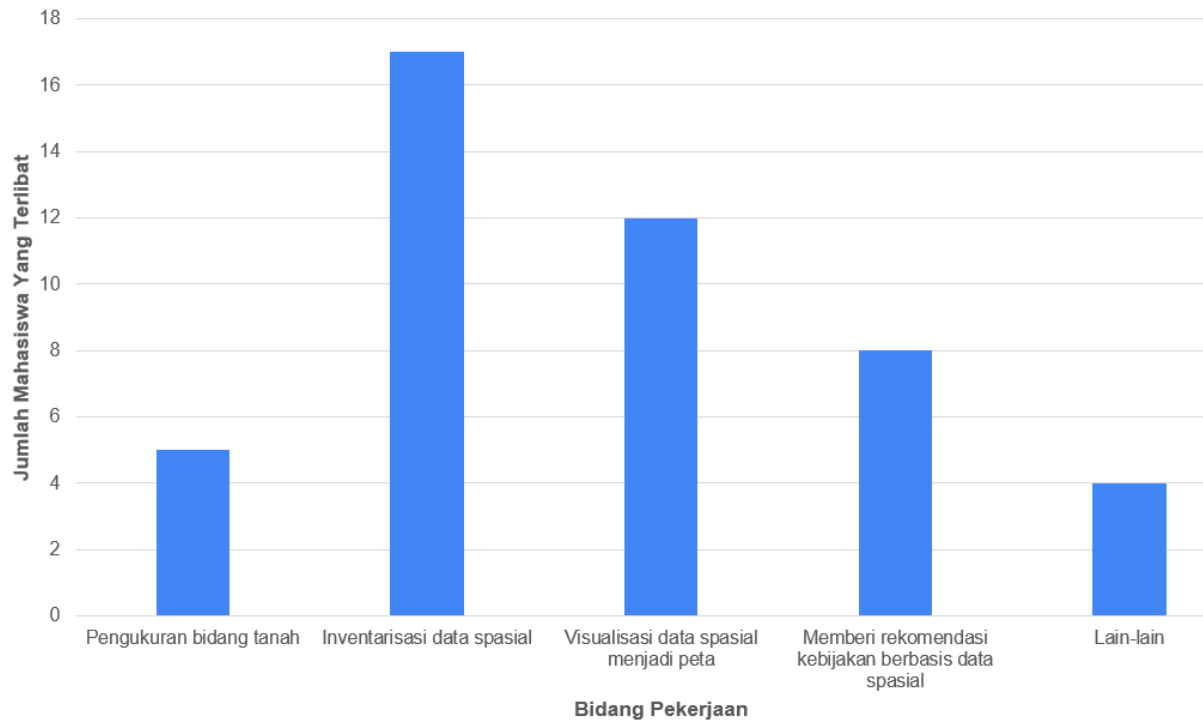


Gambar 4. Kegiatan mahasiswa yang melakukan membantu survei lapangan selama magang di ATR/BPN

c) Dampak pelaksanaan MBKM terhadap pembangunan

Selain memberikan dampak bagi mahasiswa dan perguruan tinggi asal mahasiswa, pelaksanaan magang di Kementerian ATR/BPN juga berkontribusi terhadap pembangunan. Pekerjaan di Kementerian ATR/BPN sangat berkaitan dengan erat dengan pertanahan dan tata ruang yang merupakan pilar penting dalam pembangunan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015). Data spasial dapat digunakan untuk menunjang pembangunan setelah melalui serangkaian tahapan (Sugianto et al., 2021). Tahapan pertama yaitu input data spasial (dari penginderaan jauh, survei lapangan, GPS), analisis spasial berbasis sistem informasi geografis (SIG), dan visualisasi data spasial dalam bentuk peta guna penentuan kebijakan maupun landasan ilmiah suatu fenomena tertentu.

Berdasarkan hasil survei (Gambar 5), kontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan mahasiswa Geografi UMS selama magang di Kementerian ATR/BPN berupa inventarisasi data spasial (17 mahasiswa), visualisasi data spasial menjadi peta (12 mahasiswa), memberi rekomendasi kebijakan berbasis data spasial (8 mahasiswa), dan pengukuran bidang tanah (5 mahasiswa). Kegiatan magang mahasiswa Geografi UMS banyak berkontribusi dalam pembangunan dengan cara membantu pelaksanaan tupoksi Kementerian ATR/BPN dalam bidang pertanahan dan tata ruang.



Gambar 5. Bidang pekerjaan yang dilakukan mahasiswa Geografi UMS selama magang di ATR/BPN

V. SIMPULAN

Berkaitan dengan konteks pengembangan perguruan tinggi, kegiatan MBKM yang telah dilaksanakan memberi pengaruh positif dalam hal memberi masukan mengenai keilmuan geografi yang banyak dibutuhkan di dunia kerja, memperbesar potensi kerjasama dengan mitra magang, peningkatan kompetensi keilmuan mahasiswa, dan modal untuk meraih akreditasi institusi yang unggul. Kontribusi terhadap pembangunan yang dilakukan mahasiswa Geografi UMS dalam membantu tupoksi Kementerian ATR/BPN berupa inventarisasi data spasial, visualisasi data spasial menjadi peta, memberi rekomendasi kebijakan berbasis data spasial, dan pengukuran bidang tanah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Setditjen Dikti Ristek yang telah memberi pembiayaan kegiatan riset ini melalui Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian dan Purwarupa PTS Kontrak Nomor: 404/PPK/Kerma/PKS/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, J. R., & Deitz, R. (2012). Do colleges and universities increase their region's human capital? *Journal of Economic Geography*, 12(3), 667–691. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbr020>
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120-143.
- BAN PT. (2019). Akreditasi Perguruan Tinggi. Diakses dari https://www.banpt.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Lampiran-02-PerBAN-PT-3-2019-Kriteria-dan-Prosedur-IAPT-3_0.pdf [24 Desember 2019]

- Boucher, G., Conway, C., & Van Der Meer, E. (2003). Tiers of engagement by universities in their region's development. *Regional Studies*, 37(9), 887–897. <https://doi.org/10.1080/0034340032000143896>
- Breznitz, S. M., & Feldman, M. P. (2012). The engaged university. *Journal of Technology Transfer*, 37(2), 139–157. <https://doi.org/10.1007/s10961-010-9183-6>
- Charles, D., Kitagawa, F., & Uyarra, E. (2014). Universities in crisis?-new challenges and strategies in two English city-regions. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 7(2), 327–348. <https://doi.org/10.1093/cjres/rst029>
- Dirjen Dikti. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta, Indonesia: Dirjen Dikti Kemdikbud RI. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ujmte>
- Djaja, D. L. (2016). Yogya Utara= Bandung Utara? Dilema Tata Ruang Kawasan Resapan Air di DIY. *Forum Geografi*, 8(1), 13-19
- Goddard, J., & Vallance, P. (2013). The civic university: Connecting the global and the local. In *Universities, Cities and Regions: Loci for Knowledge and Innovation Creation* (pp. 43–63). London: Rout. <https://doi.org/10.4324/9780203097144>
- Giyarsih, S. R. (2016). Koridor Antar Kota sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi yang Semakin Penting. *TATALOKA*, 14(2), 90-97.
- Gunasekara, C. (2006). Reframing the role of Universities in the development of regional innovation systems. *Journal of Technology Transfer*, 31(1), 101–113. <https://doi.org/10.1007/s10961-005-5016-4>
- Hermanto, A., Kusnanto, G., & Fadilah, N. (2021). Pengembangan Model Sistem Informasi Dalam Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Untuk Mendukung Program MBKM. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 20-27.
- Kodrat, D. (2021). Industrial Mindset of Education in Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Policy. *Jurnal Kajian Peradaban Islam*, 4(1), 9–14. <https://doi.org/10.47076/jkpi.v4i1.60>
- Krisnanik, E., Saphira, Q., & Indriana, I. H. (2021). Desain Model MBKM Dan Kolaborasi Kerja Sama Model Pentahelix Guna Meningkatkan Daya Saing Lulusan. *Proceeding KONIK (Konferensi Nasional Ilmu Komputer)*, 5, 138-142.
- Lutfia, D. D., & Rahadi, D. R. (2020). Analisis Internship Bagi Peningkatan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 8(3), 199-204.
- Mansur, H., Utama, A. H., & Mastur, M. (2020). Program Hibah Program Studi Teknologi Pendidikan Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).
- Nugraheni, D., & Wijaya, L. S. (2017). Pelaksanaan Program Internship Dalam Upaya Meningkatkan Citra Lembaga Pendidikan (Studi Kasus: Fakultas Teknologi Informasi– Universitas Kristen Satya Wacana). *Scriptura*, 7(2), 47-56.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Sanchez-Carrillo, J. C., Cadarso, M. A., & Tobarra, M. A. (2021). Embracing higher education leadership in sustainability: A systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 298, 126675. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126675>
- Santoalha, A., Biscaia, R., & Teixeira, P. (2018). Higher education and its contribution to a diverse regional supply of human capital: does the binary/unitary divide matters? *Higher Education*, 75(2), 209–230. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0132-2>
- Soesilowati, E. S. (2009). *Link and Match Dunia Pendidikan Dan Industri*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Sugianto, S., Rusdi, M., Baihaqi, A., & Fazlina, Y. D. (2021). Utilization of geospatial technology for land use planning and sustainable agricultural mapping in Aceh Province,

- Indonesia: a case study. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 667(1),012101
- Trippl, M., Sinozic, T., & Lawton Smith, H. (2015). The Role of Universities in Regional Development: Conceptual Models and Policy Institutions in the UK, Sweden and Austria. *European Planning Studies*, 23(9), 1722–1740. <https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1052782>
- Umar, I., Dewata, I., & Barlian, E. (2019). Konsistensi rencana tata ruang permukiman dan arahan kebijakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 9(2), 277-286.
- Uyarra, E. (2010). Conceptualizing the regional roles of universities, implications and contradictions. *European Planning Studies*, 18(8), 1227–1246. <https://doi.org/10.1080/09654311003791275>
- Wibawa, S. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat). *Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri*. Yogyakarta, 29, 01-15.